

**RIRIN WULAN SARI
BATUBARA
NIM 210510366**

RINGKASAN

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pencairan Dana Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Muksalmina, S.H.I, M.H.)**

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya penyimpangan antara kewajiban hukum dan etika PNS untuk menjaga integritas sesuai ketentuan KUHP dan UU Tipikor, realitas penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara. Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penegakan hukumnya justru terbatas pada Pasal 263 ayat (2) KUHP tanpa mempertimbangkan UU Tipikor, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepastian dan efektivitas hukum dalam memberantas penyimpangan jabatan di sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menelaah Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan PNS dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu adanya kesengajaan dalam menggunakan surat palsu berupa cek yang ditandatangani secara ilegal, pengetahuan terdakwa atas kepalsuan surat, serta terbuktinya kerugian negara sebesar Rp191.133.000, yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm dinilai telah disusun secara objektif, proporsional, dan sesuai prinsip *lex certa* serta *lex stricta*, Hakim tetap memberikan putusan yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif, yakni pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan mempertimbangkan unsur yang memberatkan berupa penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara, serta unsur yang meringankan seperti penyesalan terdakwa, tanggungan keluarga, dan pengembalian kerugian.

Saran, diperlukan kebijakan berupa pedoman yurisprudensi khusus terkait pemidanaan terhadap PNS yang menyalahgunakan jabatan dalam perkara pemalsuan surat, agar tercipta standar penjatuhan hukuman yang konsisten dan adil.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pegawai Negeri Sipil, Dana Puskesmas.

SUMMARY

**RIRIN WULAN SARI
BATUBARA
NIM 210510366**

Juridical Analysis of the Criminal Act of Document Forgery Committed by a Civil Servant in the Disbursement of Funds at Blang Cut Public Health Center in Lhokseumawe (Study of Decision Number 229/Pid.B/2018/PN.Lsm) (Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Muksalmina, S.H.I, M.H.)

The criminal act of document forgery committed by a Civil Servant in the disbursement of National Health Insurance (JKN) funds at the Blang Cut Public Health Center in Lhokseumawe demonstrates a deviation between the legal and ethical obligations of civil servants to uphold integrity under the Criminal Code (KUHP) and the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), and the reality of abuse of authority for personal gain that results in state financial losses. Although the offender's actions fulfilled the elements of a corruption offense, legal enforcement was limited to Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code, without considering the Anti-Corruption Law.

This study aims to analyze the elements of the criminal act of document forgery committed by a civil servant in the disbursement of National Health Insurance funds at the Blang Cut Public Health Center in Lhokseumawe, and to examine the judge's considerations in rendering a verdict based on Decision Number 229/Pid.B/2018/PN Lsm.

This research applies a normative juridical method with statutory and case approaches. It is descriptive-analytical in nature, focusing on the analysis of Decision Number 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Data were obtained through literature review and analyzed qualitatively.

*The results of the study indicate that the criminal act of document forgery committed by the civil servant in the disbursement of JKN funds at the Blang Cut Health Center meets all elements of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code, including the intentional use of falsified documents in the form of illegally signed checks, the offender's awareness of the forgery, and proven state losses amounting to Rp191,133,000 used for personal gain. The legal reasoning provided by the Panel of Judges in Decision Number 229/Pid.B/2018/PN Lsm is deemed objective, proportional, and in line with the principles of *lex certa* and *lex stricta*. The judges imposed a sentence that reflects a balance between retributive and restorative justice, namely a prison sentence of 2 years and 6 months, considering aggravating factors such as abuse of office and financial losses to the state, as well as mitigating factors such as the offender's remorse, family responsibility, and restitution efforts.*

It is recommended that a judicial guideline be established specifically addressing sentencing for civil servants who abuse their positions in document forgery cases, to ensure a consistent and fair standard in sentencing.

Keywords: Criminal Act, Document Forgery, Civil Servant, Public Health Center Funds.